



**PEMERINTAH KABUPATEN  
LAMONGAN**

# **L K P J TAHUN 2021**

**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH**

Lamongan  
Megilan



## LKPJ AKHIR TA 2021

### BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

#### BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

##### 3.1 CAPAIAN KINERJA RPJMD DAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2021

No	Sasaran	No	Indikator	FORMULA INDIKATOR	Satuan	Base Line 2017	Tahun			Tahun 2021	
							2018	2019	2020	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya perencanaan, Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah	1	% Kemampuan Fiskal (BPKAD)	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan} + \text{Realisasi Pembiayaan Netto}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$	%	95,13	93,60	100	100	100	106
		2	Opini Pemeriksa Eksternal	<i>Audit Eksternal</i>		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan} + \text{Realisasi Pembiayaan Netto} \times 100\%}{\text{Realisasi Belanja}} = \frac{\text{Rp } 2.944.425.681.848,78 + \text{Rp } 51.080.558.606,49}{\text{Rp } 2.820.606.679.325,55} \times 100\% = 106\%$$

## LKPJ AKHIR TA 2021

Capaian kinerja pada tahun 2021 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Untuk mengukur capaian kinerja kemampuan fiskal tahun 2021, harus dilihat data realisasi APBD 2021 yang dapat dilihat dibawah ini :

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	%
<b><u>Pendapatan</u></b>				
Pendapatan Asli Daerah	477.998.311.040,00	618.005.767.637,78	140.007.456.597,78	129,29
Pendapatan Transfer	2.329.340.517.358,00	2.246.585.515.590,00	(82.755.001.768,00)	96,45
Lain-lain pendapatan yang sah	165.408.817.106,00	79.834.398.621,00	(85.574.418.485,00)	48,26
Jumlah Pendapatan	2.972.747.645.504,00	2.944.425.681.848,78	(28.321.963.655,22)	99,05
<b><u>Belanja</u></b>				
Belanja operasional	2.018.814.761.443,00	1.867.417.987.606,06	(151.396.773.836,94)	92,50
Belanja modal	360.874.079.500,00	320.911.297.115,51	(39.962.782.384,49)	88,93
Belanja tidak terduga	30.000.000.000,00	19.385.935.437,28	(10.614.064.562,72)	64,62
Belanja Transfer	612.983.251.167,00	612.891.459.166,70	(91.792.000,30)	99,99
Jumlah Belanja dan Transfer	3.022.672.092.110,00	2.820.606.679.325,55	(202.065.412.784,45)	93,32
<b><u>Pembiayaan Daerah</u></b>				
Penerimaan Pembiayaan	52.424.446.606,00	53.580.558.606,49	1.156.112.000,49	102,21
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah Pembiayaan Daerah	49.924.446.606,00	51.080.558.606,49	1.156.112.000,49	102,32

**PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pada Masa Pandemi Covid 19 ini, Pemerintah Pusat beberapa kali mengeluarkan kebijakan PPKM. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap laju perekonomian/Pendapatan masyarakat dan notabene berpengaruh pula terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Di Tahun Anggaran 2021, Komponen Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 618.005.767.637,78 atau sebesar 129,29% dari target sebesar Rp.477.998.311.040,00. Secara umum realisasi per komponennya mengalami kinerja sebagai berikut: Pajak Daerah sebesar Rp.134.404.544.416,00 atau terealisasi 97,68%, Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 14.295.774.860,00 atau sebesar 85,76% dan hanya realisasi komponen lain-lain PAD yang mengalami kinerja positif sebesar Rp. 450.129.211.438,73 atau 148,21% dibanding target pada Tahun 2021. Kinerja positif komponen Lain-lain PAD tersebut berasal dari pencapaian over target sub komponen Hasil-hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, Pengembalian Perjalanan Dinas dan Pendapatan BLUD.

**PENDAPATAN TRANSFER**

Alokasi Pendapatan Transfer Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 2.329.340.517.358,00 dan terealisasi Rp. 2.246.585.515.590,00 yang berarti hanya sebesar 96,45%. Secara umum realisasi per komponennya mengalami kinerja sebagai berikut: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.018.642.940.737,00 atau 99,50% dari ketetapan definitif tahun 2021. Sedangkan Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp.227.942.574.853,00 atau 75,83% dari ketetapan. Hal ini tentu saja diakibatkan menurunnya performa perekonomian baik nasional dan global pada masa pandemi Covid 19.

**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Pada tahun 2021, Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kabupaten Lamongan hanya terealisasi sebesar Rp.79.834.398.621,00 atau hanya 48,26% dari proyeksinya. Hal ini disinyalir dikarenakan mekanisme pendanaan imbursement yang tidak didukung dengan ketersediaan dana di RKUD.

Secara keseluruhan realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 2.820.606.679.325,55 atau sebesar 93,32% dari alokasi belanja daerah pada Tahun 2021. Adapun secara ringkas kinerja per komponennya sebagai berikut:

**Belanja Operasi**, pada APBD TA 2021 ini direalisasi sebesar Rp. 1.867.417.987.606,06 atau sebesar 92,50% dari alokasi anggarannya

**Belanja Modal**, pada APBD TA 2021 ini dialokasikan sebesar Rp. 320.911.297.115,51 atau sebesar 88,93% dari alokasi anggarannya

**Belanja Transfer**, direalsiasikan sebesar Rp. 612.891.459.166,70 atau sebesar 99,99% dari alokasi anggarannya.

Sedangkan **Belanja Tidak Terduga**, pada APBD TA 2021 ini terealisasi sebesar Rp. 19.385.935.437,28 atau sebesar 64,62% dari alokasi anggarannya

**Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan secara keseluruhan direalisasi sebesar Rp. 53.580.558.606,49 atau sebesar 102,21%

**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD TA 2021 ini direalisasi sebesar Rp.2.500.000.000,00, atau 100% yang merupakan investasi ke BUMD yakni PT Bank Daerah Lamongan

2. Opini pemeriksaan Eksternal masih dalam proses Pemeriksaan BPK untuk anggaran tahun 2021, Namun dari Tahun 2016-2020 Realisasi telah sesuai target dengan meraih WTP. Pada tahun sebelumnya Target Opini Pemeriksa Eksternal dapat tercapai karena didukung oleh
  - Kegiatan yang di rencanakan berjalan sesuai target
  - Laporan yang sesuai dengan standar SAP
  - Akuntabilitas keuangan Bagus
  - Koordinasi dan sinergi yang baik dengan pihak pihak terkait
  - Monitoring dan evaluasi secara berkala
  - Memaksimalkan penggunaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset

Sedangkan untuk capaian kinerja maupun anggaran program dan kegiatan di tuangkan menggunakan tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Urusan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah 2. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah 3. Peningkatan penatausahaan aset daerah dengan tertib 4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta penyusunan penganggaran harus sesuai dan selaras mulai dari penyusunan KUA-PPAS-RKA-DPA	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>IKM Internal BPKAD</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	1. Perlunya Peningkatan Kualitas Optimalisasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Pengembangan teknologi belum maksimal terkait Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan keuangan 3. Kuantitas dan kualitas SDM BPKAD masih kurang sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja 4. Masih ditemukannya ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dengan APBD 5. 6. SIPD masih belum bisa mengakomodir secara	1. Adanya peraturan perundangundangan terkait sistem keuangan yang dapat dipedomani 2. Secara bertahap akan dilakukan bimtek dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Komitmen dan etos kerja ASN BPKAD yang tinggi 4. Mematangkan proses perencanaan agar tidak berubah-ubah 5. Koordinasi dengan pihak IT Kemendagri yang menangani SIPD
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan, jumlah dokumen renstra dan renja yang di selesaikan	2 Dokumen, 4 Dokumen	2 Dokumen, 4 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dikerjakan	5 dokumen	5 dokumen		
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang di susun	35 ASN	35 ASN		

## LKPJ AKHIR TA 2021

				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan verifikasi : TERPA, Realisasi Fisik, SPP, SPM, SPJ Fungsional (Bendahara pengeluaran PPKD dan SPKD), SPJ Fungsional (Bendahara Penerimaan SKPD dan PPKD), PBB online pengajuan belanja 2 kali perbulan	32 kali	32 kali	keseluruhan terutama di bidang Penatausahaan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun ( Neraca, LRA, CALK, SPJ Fungsional, PBB, Realisasi Fisik, TEPR)	7 laporan	7 laporan		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulanan	12 laporan	12 laporan		
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	70 orang	70 orang		
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27 Jenis alat listrik	27 Jenis alat listrik		

## LKPJ AKHIR TA 2021

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan yang dibutuhkan	5 orang	5 orang	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	64 jenis ATK	64 jenis ATK	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan pengandaan	10 Jenis Cetak dan 17 Pengandaan	10 Jenis Cetak dan 17 Pengandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis buku	10 jenis buku	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Jumlah pengadaan makan dan minum	69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pengadaan mobil jabatan	3 unit	3 unit	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas dinas/operasional	1 unit roda 4	1 unit roda 4	
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeleur	7 rak arsiip	7 rak arsiip	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer	
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 Jenis	3 Jenis	

## LKPJ AKHIR TA 2021

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga honoerer/tenaga pengamanan/sopir yang menerima gaji/honor	38 orang	38 orang		
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, jumlah STNK yang terlunasi	1 unit, 9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2	1 unit, 9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2,	9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2,		
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	30 unit mebeleur	30 unit mebeleur		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	30 unit perlengkapan , 30 unit peralatan	30 unit perlengkapan , 30 unit peralatan		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket taman, 1 unit gedung	1 paket taman, 1 unit gedung		
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Presentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Presentase ketepatan laporan keuangan OPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		

## LKPJ AKHIR TA 2021

				<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>		
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2022	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD TA 2022	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang di susun dan jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang APBD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang di susun	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pedoman pelaksanaan APBD 2023	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	2 kali	2 kali		
				<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>jumlah dokumen laporan BUD yang disusun</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>		
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan posisi kas daerah	288 laporan	288 laporan		

**LKPJ AKHIR TA 2021**

				Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah dokumen pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD	260 dokumen	260 dokumen		
				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan dana transfer	14 laporan	14 laporan		
				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D secara tepat waktu	65 OPD	65 OPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan PFK	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen		

## LKPJ AKHIR TA 2021

				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D	65 OPD	65 OPD		
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah buku Sisdur perbendaharaan, sosialisasi dan bimtek	100 buku	100 buku		
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan daerah.	65 OPD	65 OPD		
				<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>		
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen LRA konsolidasi bulanan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen bukti memorial, jumlah dokumen hasil rekonsiliasi	65 Dokumen, 130 dokumen	65 Dokumen, 130 dokumen		
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan konsolidasian	2 Dokumen	2 Dokumen		

## LKPJ AKHIR TA 2021

				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100 persen	100 persen		
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan analisis keuangan daerah yang di susun	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan SOP	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen	65 Dokumen		
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen	65 Dokumen		
				<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan</b>	<b>462 Desa</b>	<b>462 Desa</b>		
				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah					
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah penyaluran bantuan	2 kali	2 kali		

## LKPJ AKHIR TA 2021

				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah pengelola dana darurat dan mendesak	1 paket	1 paket		
				<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah analisis dan implementasi sistem informasi keuangan daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>		
				Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	2 kali	2 kali		
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Prosentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum.</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>		
				<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>		
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen SSH	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBM	masing-masing 150 buku	masing-masing 150 buku		
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan	250 buku	250 buku		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan, jumlah peningkatan tertib penatausahaan BMD, sosialisasi penatausahaan barang	180 buku dan 65 OPD	180 buku dan 65 OPD		

## LKPJ AKHIR TA 2021

				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD	11 buku dan 65 OP	11 buku dan 65 OP		
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Nama Kepemilikan, Jumlah Sertifikat Tanah	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang		
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan tanah dan penggunaan bangunan	12 SK	12 SK		
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang akan dilakukan pemanfaatan (sewa, hibah, pinjam pakai)	65 OPD	65 OPD		
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah	150 buku dan 65 OPD	150 buku dan 65 OPD		
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah buku penyusunan laporan barang milik daerah	65 OPD	65 OPD		
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pengelola barang milik daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah, sosialisasi pengelolaan BMD	65 OPD	65 OPD		

## LKPJ AKHIR TA 2021

Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan.

### BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 17.257.808.274</b>	<b>Rp13.867.363.838</b>	<b>80,35</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 75.000.000</b>	<b>Rp 68.921.300</b>	<b>91,90</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 25.000.000	Rp 21.117.600	84,47
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 25.000.000	Rp 24.188.200	96,75
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25.000.000	Rp 23.615.500	94,46
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 12.144.224.374</b>	<b>Rp 10.534.994.891</b>	<b>86,75</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 12.003.354.374	Rp 10.394.908.441	86,60
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 46.286.000	Rp 46.285.950	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 32.243.600	Rp 32.238.100	99,98
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 62.340.400	Rp 61.562.400	98,75
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp -	Rp -	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 449.010.800</b>	<b>Rp 402.223.746</b>	<b>89,58</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 55.000.000	Rp 54.578.800	99,23
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 71.100.000	Rp 70.464.000	99,11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 75.000.000	Rp 74.593.900	99,46
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 49.706.800	Rp 49.632.000	99,85
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 53.204.000	Rp 49.385.500	92,82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 145.000.000	Rp 103.569.546	71,43
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 1.702.409.400</b>	<b>Rp 672.948.550</b>	<b>39,53</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 1.540.489.100	Rp 545.705.800	35,42
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp -	Rp -	-

## LKPJ AKHIR TA 2021

Pengadaan Mebel	Rp	52.600.000	Rp	52.557.750	99,92
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	109.320.300	Rp	74.685.000	68,32
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.261.484.000</b>	<b>Rp</b>	<b>1.566.569.351</b>	<b>69,27</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	1.367.000.000	Rp	767.678.315	56,16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	894.484.000	Rp	798.891.036	89,31
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>625.679.700</b>	<b>Rp</b>	<b>621.706.000</b>	<b>99,36</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	50.000.000	Rp	49.281.850	98,56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	90.000.000	Rp	89.112.550	99,01
Pemeliharaan Mebel	Rp	10.000.000	Rp	9.850.000	98,50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	50.000.000	Rp	49.985.000	99,97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	425.679.700	Rp	423.476.600	99,48
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Rp</b>	<b>646.810.891.567</b>	<b>Rp</b>	<b>506.223.620.739</b>	<b>78,26</b>
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.501.740.400</b>	<b>Rp</b>	<b>1.469.419.900</b>	<b>97,85</b>
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp	130.303.500	Rp	129.898.400	99,69
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp	163.830.000	Rp	162.851.700	99,40
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp	112.000.500	Rp	105.499.600	94,20
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp	83.400.100	Rp	83.400.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp	467.090.000	Rp	449.458.000	96,23
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp	371.004.000	Rp	365.201.200	98,44
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp	106.647.300	Rp	105.646.000	99,06
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	67.465.000	Rp	67.465.000	100,00
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>1.341.715.300</b>	<b>99,39</b>

## LKPJ AKHIR TA 2021

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp	125.000.000	Rp	124.963.100	99,97
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp	70.000.000	Rp	69.570.000	99,39
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp	125.000.000	Rp	125.000.000	100,00
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp	16.307.300	Rp	16.307.300	100,00
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp	125.000.000	Rp	125.000.000	100,00
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp	158.950.000	Rp	157.990.000	99,40
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	50.000.000	Rp	49.581.000	99,16
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp	-	Rp	-	-
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp	333.550.000	Rp	327.627.800	98,22
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp	132.500.000	Rp	132.317.800	99,86
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	213.692.700	Rp	213.358.300	99,84
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>880.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>876.144.850</b>	<b>99,56</b>
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp	-	Rp	-	-
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp	129.190.400	Rp	128.685.300	99,61
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp	142.201.600	Rp	142.201.600	100,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	195.623.300	Rp	195.623.300	100,00

## LKPJ AKHIR TA 2021

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp	292.517.400	Rp	292.402.400	99,96
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp	29.000.000	Rp	26.540.000	91,52
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp	-	Rp	-	-
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp	-	Rp	-	-
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	91.467.300	Rp	90.692.250	99,15
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	-	Rp	-	-
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Rp	-	Rp	-	-
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>643.033.251.167</b>	<b>Rp</b>	<b>502.504.663.903</b>	<b>78,14</b>
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp	613.033.251.167	Rp	483.118.728.466	78,81
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp	30.000.000.000	Rp	19.385.935.437	64,57
<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>45.900.000</b>	<b>Rp</b>	<b>45.900.000</b>	<b>100,00</b>
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Rp	45.900.000	Rp	45.900.000	100,00
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Rp	-	Rp	-	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Rp</b>	<b>910.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>905.114.575</b>	<b>99,46</b>
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>910.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>905.114.575</b>	<b>99,46</b>
Penyusunan Standar Harga	Rp	75.000.000	Rp	75.000.000	100,00
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp	35.000.000	Rp	33.097.500	94,56
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp	35.000.000	Rp	35.000.000	100,00
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	35.000.000	Rp	35.000.000	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000	100,00

**LKPJ AKHIR TA 2021**

Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp	125.000.000	Rp	124.997.500	100,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp	175.000.000	Rp	173.704.000	99,26
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	60.000.000	Rp	59.998.700	100,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp	30.000.000	Rp	28.847.000	96,16
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	100,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp	100.000.000	Rp	99.470.000	99,47
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	175.000.000	Rp	174.999.875	100,00

**3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan**

Kebijakan strategis yang ditetapkan Kepala Daerah pada sub sektor keuangan sebagai berikut :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 Tahun 2021	Sebagai dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang sedang berjalan. Serta pedoman dalam merencanakan kegiatan suatu daerah untuk tahun anggaran berikutnya.
2	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021	Sebagai dasar untuk menjabarkan Perubahan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang sedang berjalan. Serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk pertumbuhan ekonomi.
3	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2021	Sebagai tolak ukur dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2021	Sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah yang diselesaikan
<b>KEUANGAN</b>			
1	Tidak tercapainya target pendapatan daerah dikarenakan realisasi pada lain-lain pendapatan yang syah yang hanya sebesar 87,74% .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait tidak tercapainya target pendapatan daerah karena turunnya penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, untuk itu akan dilakukan rekonsiliasi dengan pemerintah provinsi agar mendapatkan target dan ketetapan yang akurat sehingga dapat merencanakan dengan baik.</li> <li>- Dan untuk Kedepannya akan dilakukan koordinasi secara intensif dengan Pemprov Jawa Timur terkait rendahnya realisasi lain-lain pendapatan yang sah terutama yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menetapkan anggaran secara akurat.</li> <li>- Menyelaraskan target lain-lain pendapatan daerah terutama pada akun Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Yang mana pada TA 2020 hanya terealisasi 58,57</li> </ul>
2	Re-evaluasi kinerja dari BAPENDA dan OPD Penghasil sehingga kinerja pendapatannya lebih optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan dilakukan rekonsiliasi secara bulanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menegetahui perkembangan target perbulannya.</li> </ul>
<b>BELANJA</b>			
3	Re-evaluasi terkait rendahnya realisasi belanja dan tidak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kajian terhadap sektor – sektor ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian sehigga dapat mengurangi dampak dari refokusing anggaran, dan dapat segera membangkitkan perekonomian masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat memilih prioritas yang tepat</li> </ul>
4	Perbaikan dalam perencanaan anggaran dan peningkatan kinerja dengan lebih mengoptimalkan realisasi anggaran yang telah ditargetkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan dan tahapan sebagaimana ketentuan yang berlaku, Ke depannya akan dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait penentuan kebijakan-kebijakan belanja yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</li> <li>- Penggunaan SSH yang terintegrasi dengan aplikasi penganggaran untuk menentukan jumlah anggaran yang sesuai dengan kondisi riil dilapangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan Perencanaan anggaran dan optimalisasi realisasi anggaran.</li> <li>- Memperkecil defiasi penganggaran sehingga pengklifikasiannya lebih efektif dan efisien.</li> </ul>

**BAB IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

**4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan**

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak melaksanakan tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak melaksanakan pemberian tugas pembantuan untuk tingkatan pemerintahan di bawahnya.

**4.2 Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak ada hambatan/ permasalahan sebab tidak melaksanakan tugas pembantuan .

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

**Drs. HERY PRANOTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620805 198903 1 010

